

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1 Deskripsi Desa Ponggok

Ponggok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa tengah. Secara geografis Desa Ponggok terletak di bagian timur pusat pemerintahan Kabupaten Klaten dan berjarak sekitar 100 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Dengan rincian batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Ponggok

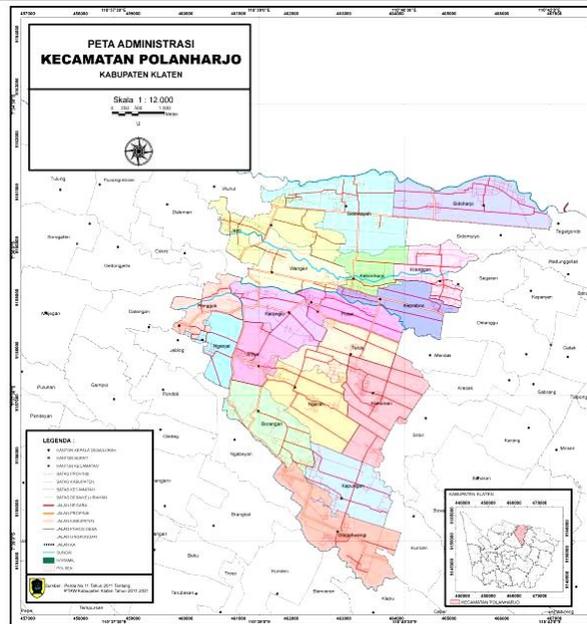
Keterangan Umum	
Luas Desa	77,2255 Ha
Rincian Batas Wilayah	
Utara	Desa Cokro Kecamatan Tulung
Selatan	Desa Jeblog Kecamatan Karangnom
Barat	Desa Dalangan Kecamatan Tulung
Timur	Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

Desa Ponggok memiliki luas 77,2255 Hektar dengan perbatasan sebelah utara Desa Cokro Kecamatan Tulung, selatan Desa Jeblog Kecamatan Karangnom, barat Desa Dalangan Kecamatan Tulung, dan perbatasan sebelah timur dengan Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo.

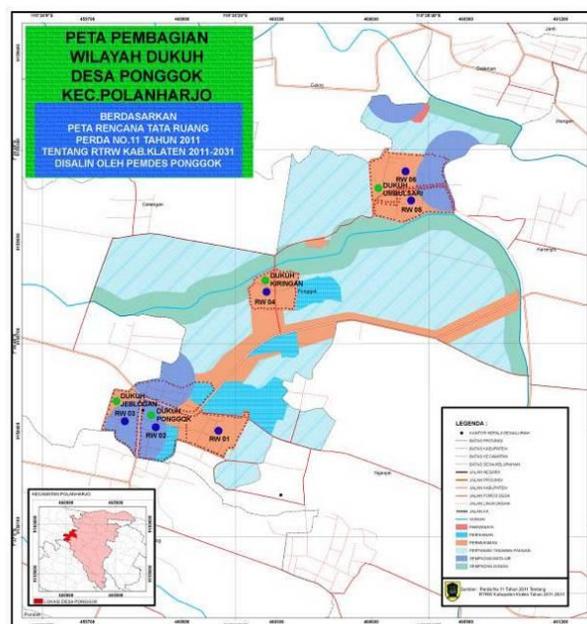
4.1.1 Peta Lokasi Desa Ponggok

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kecamatan Polanharjo



Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

Gambar 4.2
Peta Pembagian Wilayah Padukuhan Desa Ponggok



Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

4.1.2 Kondisi Demografi Desa Ponggok

a. Pembagian Wilayah

Tabel 4.2
Pembagian Wilayah RT dan RW Desa Ponggok

Dukuh	Jumlah RW	Jumlah RT
Ponggok	2	4
Jeblogan	1	2
Kiringan	1	2
Umbulsari	2	4

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

Desa Ponggok memiliki sebanyak 4 dukuh yang tersebar di 6 RW dan 12 RT. Dukuh Ponggok terdapat sebanyak 2 RW dan memiliki 4 RT, Dukuh Jeblogan terdapat sebanyak 1 RW dan memiliki sebanyak 2 RT, Dukuh Kiringan terdapat 1 RW dan memiliki 2 RT, serta Dukuh Umbulsari terdapat 2 RW dan memiliki 4 RT.

b. Jumlah Penduduk

Pada RPJMDes 2014-2019 disebutkan bahwa jumlah penduduk di Desa Ponggok sebanyak 2.085 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Kepala Keluarga : 653 KK

Jumlah Penduduk : 2.085 orang

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki : 1.042 orang

Perempuan : 1.043 orang

b) Berdasarkan Agama

Islam : 2.024 orang

Kristen : 27 orang

Katolik : 16 orang

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tamatan SD	: 383	orang
Tamatan SMP	: 262	orang
Tamatan SMA	: 716	orang
Tamatan D1/D2	: 74	orang
Tamatan S1	: 172	orang
Tamatan S2	: 3	orang

4.1.3 Visi-Misi Desa Ponggok

VISI

Terwujudnya Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan

MISI

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi bagi semua lapisan masyarakat dalam pembangunan
4. Mengembangkan Teknologi Informasi
5. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa
6. Mengembangkan seluruh potensi desa
7. Melestarikan kearifan lokal
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
9. Meningkatkan kualitas dan membangun kesadaran kesehatan masyarakat
10. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

11. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis
12. Mengembangkan kegiatan keagamaan

4.1.4 Pemerintahan Desa Pongkok

a. Konsep Pemerintahan

1. Pendekatan Spasial (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebagai acuan arah pembangunan desa.
2. Pendekatan Sektoral-BUMDES (Sektor Riil dan Sektor Keuangan) untuk membangun ekonomi desa sehingga menjadi desa yang mandiri.
3. Pendekatan Pembangunan SDM (Masyarakat, Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial Masyarakat) untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola potensi desa.
4. Pendekatan IT (Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas

b. Skenario Pengembangan Desa Pongkok

1. Pemerintahan Desa Pongkok yang berbasis *Good Governance*:
 - a) Optimalisasi implementasi master plan desa wisata dengan dukungan penuh Pemdес.
 - b) Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam pelayanan warga.
 - c) Data base kependudukan, potensi wilayah, luas lahan serta pemetaan wilayah yang detail dan lengkap.
 - d) Peningkatan kapasitas bagi anggota / pengurus lembaga desa dalam rangka mendukung proses pembangunan.

2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung permukiman yang tertata, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan serta mendukung pelayanan publik:
 - a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan baik jalan antar desa, antar dusun maupun jalan lingkungan.
 - b. Penyediaan fasilitas umum : kesehatan, pendidikan, ibadah, gudang peralatan pengembangan.
 - c. Perbaikan jalur lingkaran desa berikut dengan penanda wilayah (gapura) dan fasilitas penerangan jalan.
 - d. Peningkatan sarana sanitasi dan perumahan warga miskin meliputi pembangunan MCK/Jamban, Rumah Sehat dan rehab RTLH.
 - e. Peningkatan infrastruktur kantor desa untuk mendukung pelayanan publik.
 - f. Revitalisasi Umbul Pongok, Besuki, Sigedang dan Banyu Mili.
 - g. Penataan saluran air serta perbaikan bak air, saluran drainase dan didukung dengan penghijauan.
 - h. Pembangunan dan perbaikan saluran limbah permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata.
3. Bidang pertanian menuju Desa Pongok yang mandiri beras:
 - a. Perbaikan/peningkatan kualitas saluran irigasi dan fasilitas pendukung pertanian lainnya yang saat ini di beberapa titik perlu penanganan segera.
 - b. Penyediaan peralatan saprodi.
 - c. Ketersediaan pupuk bagi petani untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

- d. Perbaiki sistem atau pola tanam.
 - e. Pola tanam sistem organik.
 - f. Optimalisasi peran gapoktan dalam pendampingan petani.
 - g. Perbaiki/peningkatan kualitas jalan menuju areal pertanian untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan hasil pertanian.
4. Bidang ekonomi, meningkatnya pendapatan keluarga-naiknya daya beli masyarakat:
- a. Tersedianya permodalan dan peluang usaha.
 - b. Terbentuknya peluang bagi masyarakat dalam sektor usaha kecil.
 - c. Investasi warga.
 - d. Pasar Desa/Pasar Transit Desa.
 - e. Terbentuknya BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.
 - f. Usaha Kecil berbasis potensi lokal.
 - g. Terbangunnya sentra ekonomi.
5. Bertumbuh dan berkembangnya kembali Modal Sosial (gotong royong, rasa saling percaya dan kebersamaan):
- a. Membangun sarana dan prasarana sosial budaya.
 - b. Bertumbuh dan berkembangnya kembali kegotong royongan warga.
 - c. Hilangnya kesenjangan sosial.
 - d. Pencegahan terjadinya kenakalan remaja.
 - e. Membangun kebersamaan.
6. Bidang lingkungan hidup, menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan:

- a. Konservasi air berbasis kearifan lokal dan teknologi.
 - b. Permukiman layak huni.
 - c. Lingkungan hidup untuk wisata.
 - d. Pengelolaan limbah rumah tangga.
 - e. Penyediaan jalur hijau.
 - f. Penanaman pohon.
 - g. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - h. Menjaga daerah tangkapan air agar lestari
7. Bidang pariwisata yang didukung oleh lingkungan dan sosial budaya yang kuat dalam upaya membangun perekonomian desa:
- a. Optimalisasi Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata utama di Desa Ponggok.
 - b. Membangun kemitraan dan sinergi untuk perluasan pangsa pasar.
 - c. Pengelolaan wisata yang profesional berbasis kapasitas warga.
 - d. Menggali wisata alternatif : wisata kuliner, pendidikan, budaya, lingkungan dll.
8. Bidang pendidikan, terbukanya akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat :
- a. Satu KK Satu Sarjana.
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan *Life Skill*.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.
 - d. Bea siswa magang dan Pelatihan Kerja Praktek.
 - e. Pendidikan gratis untuk warga miskin.

9. Tercapainya masyarakat yang sehat :
 - a. Asuransi kesehatan bagi warga.
 - b. Pembangunan fasilitas kesehatan untuk warga.
 - c. Penyadaran akan pola hidup sehat.
 - d. Perlindungan dan pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan.

4.1.5 Deskripsi BUMDes Tirta Mandiri

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Pongok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Pongok melakukan praktik deliberative democracy untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa

Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri.

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dalam perjalanannya mengalami banyak kendala, walaupun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata. Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semakin pesimis BUMDes bisa berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Belum lagi masalah keterbatasan SDM, sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes, selain BUMDes merupakan lembaga yang baru. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang mau mendukung dan berjuang walaupun hanya beberapa saja. Awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari Kepala Desa Ponggok, perlahan-lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp. 100.000.000 dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000 (30% dari laba) pada Tahun 2010.

Mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Ponggok mengembangkan semua Obyek Wisata yang dimiliki sehingga potensi dan asset desa bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun PAD dalam melangsungkan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan mengelola satu Obyek Wisata saja yaitu Umbul Ponggok pada Tahun 2014 PADes yang diterima dari hasil usaha BUMDes sudah

sebesar Rp. 350.000.000 apabila Ponggok mengelola lima Obyek Wisata, pendapatan yang diterima akan bertambah. Keberadaan BUMDes sangat berdampak manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi angka pengangguran, di Desa Ponggok melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan BUMDes yang berjumlah 25 Orang. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner untuk masyarakat di lokasi obyek wisata Umbul Ponggok, serta menumbuh kembangkan iklim investasi bagi masyarakat, karena BUMDes sudah berhasil *go public* dengan menjual saham kepada masyarakat Ponggok untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan usaha BUMDes.

4.2 Deskripsi Desa Dlingo

Dlingo adalah sebuah desa yang memiliki letak wilayah pegunungan yang menjadi tempat mulia. Desa Dlingo ditetapkan menjadi Desa Bina Budaya pada tahun 1995 dengan SK Gubernur DIY Nomor 325 Tahun 1995. Desa Dlingo terletak di wilayah administratif Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Desa Dlingo sekitar 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul dan 30 km dari pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan rincian batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Batas Wilayah Desa Dlingo

Keterangan Umum	
Luas Desa	915,9055 Ha
Rincian Batas Wilayah	
Utara	Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Selatan	Desa Banyusoca Kabupaten Gunungkidul
Barat	Desa Dlingo Kecamatan Dlingo
Timur	Desa Jatimulyo dan Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

Desa Pongkok memiliki luas 77,2255 Hektar dengan perbatasan sebelah utara Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo, selatan Desa Banyusoca Kabupaten Gunungkidul, barat Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, dan perbatasan sebelah timur dengan Desa Desa Jatimulyo dan Kabupaten Gunungkidul.

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019

4.2.2 Kondisi Demografi Desa Dlingo

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Dukuh dan KK

No.	Nama Dukuh	Jumlah KK
1	Dlingo I	210
2	Dlingo II	105
3	Koripan I	177
4	Koripan II	189
5	Pokoh I	166
6	Pokoh II	140
7	Pakis I	219
8	Pakis II	237
9	Kebosungun I	180
10	Kebosungun II	183
Jumlah		2.058

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019

Secara demografis, Desa Dlingo memiliki 10 dusun yang tersebar diseluruh desa dan memiliki sebanyak 2.058 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Dlingo yaitu berjumlah 6.060 jiwa dengan diuraikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Dukuh	Jenis Kelamin (Orang)		Total Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dlingo I	355	343	620
Dlingo II	168	156	242
Koripan I	280	289	569
Koripan II	302	289	591
Pokoh I	228	254	482
Pokoh II	245	233	396
Pakis I	315	279	594
Pakis II	428	414	764
Kebosungun I	328	320	570
Kebosungun II	419	415	760
Jumlah	3.068	2.992	6.060

Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019.

4.2.3 Visi-Misi Desa Dlingo

VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dlingo Tahun 2018 - 2024 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: "Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Dlingo yang demokratis, agamis, mandiri dan sejahtera".

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang professional melalui melalui tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis dan berpendidikan.
4. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil potensi wilayah.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang partisipatif.
6. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

4.2.4 Pemerintahan Desa Dlingo

a. Konsep Pemerintahan

1. Program peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintah desa melalui pendidikan berkelanjutan (*Continuing education*)
2. Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
3. Program peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.

4. Program reformasi anggaran untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa.
5. Program peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintahan desa.
6. Program pengembangan jejaring kerjasama atau kemitraan dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

b. Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan desa menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan.

1. Langkah-Langkah Strategis

Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas maka langkah-langkah strategis yang telah ditempuh dan akan dilanjutkan adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan dan peningkatan peran kelembagaan desa;
- b. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan desa;
- c. Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat;
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Peningkatan peran perempuan;
- h. Optimalisasi potensi SDA desa;
- i. Penurunan prosentase penduduk miskin;
- j. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. Peningkatan akses antar desa

2. Analisis Skala Prioritas

Pembangunan sebenarnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Segitiga bersudut ini merupakan mata pisau yang harus dijaga ketajamannya, atau dengan kata lain bagaimana kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap melestarikan alam dan menjaga keadilan sosial. Fokus utama pembangunan di Desa Dlingo adalah pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan akan memenuhi rasa keadilan sosial, namun tetap menjaga kelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung penciptaan iklim kondusif.

Berdasarkan analisis tersebut, maka skala prioritas pembangunan di Desa Dlingo adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*);
- c. Peningkatan infrastruktur desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat dan potensi desa.
- e. Peningkatan akses desa

4.2.5 Deskripsi BUMDes Giritama

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Giritama merupakan media untuk penopang kesejahteraan Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUMDes Giritama merupakan bentuk inisiasi yang diberikan oleh Kepala Desa Dlingo pada saat itu Bahrin Wardoyo. Unit usaha pertama yang dimiliki BUMDes Giritama adalah Desamart. Unit usaha Desamart merupakan bentuk nyata yang diberikan Desa Dlingo dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada bidang wirausaha. Konsep dari Desamart hampir sama dengan toko-toko

modern berjejaring yang tujuannya untuk memnuhi kebutuhan masyarakat Desa Dlingo sehingga perekonomian tetap stabil.

Jarak Desa Dlingo dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bantul adalah sekitar 30 km. Salah satu faktor yang mempengaruhi dibentuknya BUMDes Giritama adalah untuk membantu masyarakat Desa Dlingo dalam meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan harian, mengingat jarak pusat pemerintahan dan perbelanjaan sangat jauh. Keberadaan unit usaha Desamart disambut sangat antusias oleh seluruh masyarakat Desa Dlingo, selain itu karena Desamart merupakan bentuk representatif yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Karyawan BUMDes Giritama yang mengelola unit usaha Desamart berjumlah 4 orang yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Marketing. Seluruh karyawan BUMDes Giritama yaitu masyarakat Desa Dlingo yang dipilih secara langsung oleh Kepala Desa Dlingo Bahrun Wardoyo.